

# OECD REKOMENDASI DEWAN TENTANG PENILAIAN PERSAINGAN USAHA

2009



Meningkatnya persaingan memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan produktifitas ekonomi yang lebih tinggi. Namun di banyak wilayah, hukum, aturan, atau bentuk hambatan melalui pemerintah lainnya dapat menghambat aktifitas di pasar. Salah satu langkah penting untuk mengatasi berbagai hambatan ini adalah "penilaian persaingan usaha", yakni, evaluasi atas berbagai kebijakan dalam menemukan berbagai hambatan persaingan yang tidak perlu dalam mengembangkan berbagai alternatif kebijakan dengan tetap mencapai berbagai tujuan yang sama, dengan hambatan persaingan yang lebih sedikit.

Pada tanggal 22 Oktober 2009, Dewan OECD mengadopsi suatu Rekomendasi yang mengajak pemerintah untuk mengidentifikasi kebijakan publik yang saat ada atau yang diusulkan, yang membatasi persaingan dan untuk merevisi kebijakan tersebut dengan mengadopsi berbagai alternatif kebijakan yang lebih pro-persaingan usaha. Rekomendasi tersebut juga mengusulkan pemerintah untuk membentuk mekanisme kelembagaan dalam melaksanakan evaluasi tersebut.

Berbagai pendekatan dalam penilaian persaingan usaha sangat dimungkinkan dan OECD telah mengembangkan suatu Alat Penilaian Persaingan Usaha yang merupakan salah satunya. Informasi lebih lanjut tentang alat tersebut dapat diperoleh melalui [www.oecd.org/competition/toolkit](http://www.oecd.org/competition/toolkit).

OECD juga memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaan Rekomendasi tersebut oleh negara anggota OECD dan bukan anggota OECD. Pemerintah dari negara bukan anggota OECD yang ingin memperoleh dukungan dalam melaksanakan rekomendasi tersebut dapat menghubungi Bapak Sean Ennis dari Divisi Persaingan Usaha OECD [+33 1 45 24 89 78 atau +33 1 45 24 97 35, [DAFCOMPContact@oecd.org](mailto:DAFCOMPContact@oecd.org)].

## Tentang Komite Persaingan Usaha OECD

Komite Persaingan Usaha OECD berada di posisi terdepan dalam perdebatan kebijakan dan penegakan hukum persaingan usaha. Dengan mengumpulkan berbagai pimpinan otoritas persaingan usaha, OECD mempromosikan pertukaran pandangan, analisa, dan praktek terbaik secara rutin atas berbagai permasalahan utama kebijakan persaingan. Pekerjaan Komite didukung oleh Divisi Persaingan Usaha di dalam Direktorat untuk Urusan Keuangan dan Perusahaan OECD, [www.oecd.org/daf/competition](http://www.oecd.org/daf/competition).

## Tentang OECD

OECD merupakan suatu forum dimana berbagai pemerintah membandingkan dan mempertukarkan berbagai pengalaman kebijakan, mengidentifikasi praktek terbaik di tengah tantangan yang meningkat, dan mempromosikan berbagai putusan dan rekomendasi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi kehidupan yang lebih baik. Misi OECD adalah untuk mempromosikan berbagai kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial penduduk seluruh dunia. [www.oecd.org](http://www.oecd.org).

# REKOMENDASI DEWAN TENTANG PENILAIAN PERSAINGAN USAHA

Sebagaimana disetujui oleh Dewan pada tanggal 22 Oktober 2009  
C(2009)130 - C/M(2009)21/PROV

**DEWAN,**

**Mempertimbangkan** Pasal 5 b) dari Konvensi Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi tertanggal 14 Desember 1960;

**Mempertimbangkan** kesepakatan yang dicapai pada Rapat Dewan tingkat Menteri pada tahun 1997 bahwa pembatasan persaingan usaha sering kali merugikan dan tidak efektif dalam mendorong kepentingan umum dan harus dihindari [C/MIN(97)10];

**Mempertimbangkan** Prinsip-Prinsip Pedoman OECD tentang Peraturan Kualitas dan Kinerja [C(2005)52], yang menyerukan kepada pemerintah untuk meninjau ulang usulan peraturan baru, serta peraturan yang telah ada, dengan mengacu pada persaingan usaha;

**Menyadari** bahwa persaingan usaha mendukung efisiensi, membantu dalam upaya memastikan bahwa barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen semakin sesuai dengan pilihan konsumen, yang menghasilkan keuntungan seperti harga yang lebih rendah, kualitas yang meningkat, inovasi yang meningkat, dan produktivitas yang lebih tinggi;

**Menyadari** bahwa produktivitas yang lebih tinggi merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja;

**Menyadari** bahwa kebijakan-kebijakan umum memiliki tujuan komersial, sosial, kesehatan, keselamatan, keamanan lingkungan dan tujuan-tujuan lainnya;

**Menyadari** bahwa, terkadang, kebijakan-kebijakan umum membatasi persaingan secara tidak wajar;

**Menyadari** bahwa pembatasan yang tidak semestinya dapat terjadi dengan tidak disengaja bahkan ketika tujuan utama dari kebijakan-kebijakan umum yang bersangkutan tidak tertuju pada peraturan ekonomi dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi persaingan usaha dengan cara apa pun;

**Menyadari** bahwa kebijakan-kebijakan umum yang membatasi persaingan usaha secara tidak wajar sering kali direformasi dengan cara yang mendukung persaingan pasar sementara mencapai tujuan kebijakan-kebijakan umum;

**Menyadari** bahwa untuk pengaturan dan reformasi terhadap industri yang diatur biasanya diperlukan penilaian persaingan usaha yang terperinci terhadap dampak yang diperkirakan dapat terjadi;

**Menyadari** bahwa, dengan hal-hal lain yang setara, kebijakan-kebijakan umum dengan kerugian yang lebih sedikit bagi persaingan usaha harus lebih dipilih daripada kebijakan-kebijakan dengan

kerugian yang lebih besar terhadap persaingan usaha, dengan ketentuan bahwa kebijakan tersebut mencapai tujuan-tujuan kebijakan umum yang diidentifikasi;

**Mencatat** bahwa sejumlah negara telah melakukan penilaian persaingan usaha;

**Mencatat** bahwa OECD dan sejumlah negara Anggota OECD telah mengembangkan *toolkit* penilaian persaingan usaha;

## **I. MEREKOMENDASIKAN hal-hal sebagai berikut kepada pemerintah negara-negara Anggota;**

### ***A. Identifikasi kebijakan publik yang ada atau yang diajukan yang membatasi persaingan usaha secara tidak wajar***

1. Pemerintah perlu memperkenalkan proses yang tepat untuk mengidentifikasi kebijakan publik yang ada atau yang sedang diajukan yang membatasi persaingan usaha secara tidak wajar, serta perlu mengembangkan kriteria khusus dan transparan untuk melakukan penilaian penilaian usaha, termasuk mempersiapkan perangkat penyaringan (*screening*).
2. Dalam melakukan penilaian persaingan usaha, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada kebijakan yang membatasi:
  - i) Jumlah atau cakupan peserta pasar;
  - ii) Tindakan yang dapat diambil pelaku pasar;
  - iii) Insentif bagi peserta pasar untuk berperilaku dengan cara yang kompetitif;
  - iv) Pilihan-pilihan dan informasi yang tersedia bagi konsumen.
3. Terhadap kebijakan umum perlu dilakukan penilaian persaingan usaha bahkan apabila kebijakan tersebut mengupayakan pencapaian tujuan untuk mendukung hasil persaingan usaha, dan terutama ketika mereka:
  - i) Mengatur atau merevisi badan pengawas atau rezim (contohnya, penilaian tersebut dapat memastikan bahwa, antara lain, regulator dipisahkan(dengan sebagaimana mestinya dari industri yang diatur);
  - ii) Memperkenalkan harga atau skema peraturan untuk memasuki pasar (misalnya, penilaian tersebut dapat memastikan bahwa tidak terdapat hal yang tidak masuk akal, adanya cara intervensi yang tidak terlalu anti persaingan usaha);
  - iii) Menata ulang monopoli lama (misalnya, penilaian dapat memastikan bahwa tindakan penataan ulang sungguh-sungguh (mencapai tujuan pro-persaingan usaha mereka);
  - iv) Memperkenalkan proses persaingan-usaha-untuk-pasar (misalnya, penilaian dapat memastikan bahwa proses penawaran memberikan insentif untuk beroperasi secara efisien demi manfaat konsumen).

## **B. Revisi terhadap kebijakan publik yang membatasi persaingan usaha secara tidak wajar**

1. Pemerintah perlu memperkenalkan suatu proses yang tepat untuk melakukan revisi terhadap kebijakan publik yang ada atau yang sedang diajukan yang membatasi persaingan usaha secara tidak wajar dan perlu mengembangkan kriteria khusus dan transparan untuk mengevaluasi berbagai alternatif yang sesuai.
2. Pemerintah perlu mengadopsi alternatif yang lebih pro-persaingan usaha sesuai dengan tujuan kepentingan publik yang diupayakan dan dengan memperhitungkan manfaat serta biaya pelaksanaan.

## **C. Pengaturan Kelembagaan**

1. Penilaian persaingan usaha harus dimasukkan ke dalam peninjauan kebijakan publik dengan cara yang paling efisien dan efektif secara konsisten dengan keterbatasan kelembagaan dan sumber daya.
2. Badan persaingan usaha atau pejabat-pejabat dengan keahlian di bidang persaingan usaha perlu dilibatkan dalam proses penilaian persaingan usaha.
3. Penilaian persaingan usaha terhadap kebijakan publik yang diusulkan harus perlu diperpadukan ke dalam proses pembuatan kebijakan sejak tahap awal.

## **D. Definisi-Definisi**

Untuk tujuan Rekomendasi ini:

**"kebijakan umum"** adalah peraturan-peraturan, aturan-aturan atau undang-undang.

**"membatasi persaingan usaha secara tidak wajar"** adalah pengertian bahwa pembatasan persaingan usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan umum adalah lebih besar daripada yang diperlukan, ketika mempertimbangkan alternatif-alternatif dan biaya mereka yang layak.

**"peserta pasar"** adalah pelaku usaha, individu atau perusahaan pemerintah yang terlibat dalam usaha memasok atau membeli barang atau jasa.

**"badan-badan persaingan usaha"** adalah lembaga-lembaga publik, termasuk otoritas persaingan usaha nasional, yang diberi tanggung jawab untuk melakukan advokasi, mempromosikan dan meningkatkan persaingan pasar dan dalam peran tersebut tidak dibatasi pada sektor tertentu.

**"proses persaingan-usaha-untuk-pasar"** mengacu pada proses penawaran yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengalokasikan hak untuk memasok ke suatu pasar tertentu atau untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang terbatas selama jangka waktu yang tertentu.

**"penilaian persaingan usaha"** adalah suatu peninjauan terhadap dampak-dampak persaingan usaha dari kebijakan publik termasuk pertimbangan alternatif dan kurangnya kebijakan-kebijakan anti-persaingan usaha. Prinsip-prinsip penilaian persaingan adalah relevan pada semua tingkat pemerintahan.

**II. MENGAJAK** perekonomian-perekonomian non-anggota untuk menggabungkan dirinya dengan Rekomendasi ini dan untuk menerapkannya.

**III. MENGINSTRUKSIKAN** kepada Komite Persaingan Usaha:

Untuk bertindak sebagai forum untuk berbagi pengalaman berdasarkan Rekomendasi ini bagi negara-negara Anggota dan perekonomian non-Anggota yang telah menggabungkan diri dengan Rekomendasi ini;

Untuk mendukung Rekomendasi ini kepada Komite dan Badan OECD terkait lainnya;

Untuk melaporkan kepada Dewan dalam jangka waktu tiga tahun pengalaman yang terkait dengan Rekomendasi ini.

#### **Catatan**

Teks lengkap dari Rekomendasi juga tersedia di basis data OECD untuk berbagai instrumen hukum dimana informasi tambahan dan setiap pembaruan ke depan dapat diperoleh di : <http://acts.oecd.org/Default.aspx>

**Pernyataan oleh Amerika Serikat:** “Delegasi Amerika Serikat mengkonfirmasi dukungan Amerika Serikat untuk Rekomendasi ini, dengan memperhatikan bahwa implementasinya di Amerika Serikat dapat bergantung kepada pekerjaan cabang independen dari pemerintah, khususnya Kongres Amerika Serikat.”

**Pernyataan oleh Komisi Eropa:** “Komisi Eropa menyambut baik dan mendukung adopsi Rekomendasi tentang Penilaian Persaingan Usaha. Rekomendasi tersebut menggaris bawahi pentingnya dimana Komisi Eropa terkait dengan prinsip persaingan usaha yang diambil, dalam mempertimbangkan berbagai area kebijakan yang berbeda. Namun kami mencatat bahwa cakupan Rekomendasi agak sempit, karena pengertian kebijakan publik mengecualikan berbagai area tertentu dari proses pengambilan kebijakan. Namun demikian, oleh karena Rekomendasi tidak mencegah pihak manapun dalam melebihi standar yang ada di dalam Rekomendasi, Komisi Eropa dapat mendukung secara penuh pengadopsian dokumen ini”.

# DAFTAR PERIKSA PERSAINGAN USAHA

Daftar periksa ini merupakan bagian dari Alat Penilaian Persaingan Usaha OECD, dikembangkan untuk membantu pemerintah guna mengatasi berbagai hambatan persaingan usaha berdasarkan rekomendasi tersebut. Ia juga mencatat bahwa penilaian persaingan usaha harus dilaksanakan jika suatu pasal hukum dalam kebijakan memiliki salah satu dampak sebagai berikut:



## A

### Membatasi jumlah atau cakupan pemasok

Hal ini dapat diperkirakan terjadi apabila usulan tersebut:

- A1** Memberikan hak eksklusif kepada satu pemasok untuk menyediakan barang atau jasa
- A2** Menetapkan suatu lisensi, ijin atau proses otorisasi sebagai persyaratan untuk kegiatan operasional
- A3** Membatasi kemampuan jenis pemasok tertentu untuk menyediakan barang atau jasa
- A4** Menaikkan biaya masuk atau keluar secara signifikan oleh satu pemasok
- A5** Menciptakan hambatan geografis kepada perusahaan-perusahaan untuk memasok barang, jasa, atau tenaga kerja, atau melakukan penanaman modal

## B

### Membatasi kemampuan para pemasok dalam bersaing

Hal ini dapat diperkirakan terjadi apabila usulan tersebut:

- B1** Membatasi kemampuan para penjual dalam menentukan harga barang atau jasa
- B2** Membatasi kebebasan para pemasok dalam mengiklankan atau memasarkan barang atau jasa mereka
- B3** Menentukan standar kualitas produk yang menguntungkan bagi pemasok-pemasok tertentu dibandingkan dengan pemasok-pemasok lain atau yang berada di atas tingkatan yang akandipilih oleh pelanggan yang memiliki informasi yang memadai (*well-informed*)
- B4** Secara signifikan menaikkan biaya produksi bagi sebagian pemasok dibandingkan dengan pemasok-pemasok yang lainnya (khususnya dengan memberikan perlakuan berbeda kepada para pemasok lama dibandingkan dengan para pemasok baru)

## C

### Mengurangi insentif bagi para pemasok dalam bersaing

Hal ini dapat diperkirakan akan terjadi apabila usulan tersebut:

- C1** Menciptakan rezim pengaturan sendiri (*self-regulatory*) atau rezim pengaturan bersama (*co-regulatory*)
- C2** Mewajibkan atau mendorong agar informasi tentang hasil produksi, harga, penjualan atau biaya para pemasok dipublikasikan
- C3** Mengecualikan kegiatan industri atau kelompok pemasok tertentu dari pemberlakuan hukum persaingan usaha umum

## D

### Membatasi pilihan-pilihan dan informasi yang tersedia bagi para konsumen

Hal ini dapat diperkirakan akan terjadi apabila usulan yang bersangkutan:

- D1** Membatasi kemampuan para konsumen dalam memutuskan dari pihak mana mereka membeli
- D2** Mengurangi mobilitas pelanggan di antara para pemasok barang atau jasa dengan menaikkan biaya eksplisit dan implisit untuk pergantian pemasok
- D3** Secara mendasar mengubah informasi yang dibutuhkan pembeli untuk berbelanja secara efektif

Akses teks lengkap dari alat ini, tersedia untuk diunduh dalam berbagai bahasa pada [www.oecd.org/competition/toolkit](http://www.oecd.org/competition/toolkit)



[oe.cd/competition-recommendations](https://oe.cd/competition-recommendations)

